

**IMPLEMENTASI PROGRAM BINA KELUARGA REMAJA (STUDI PADA KELOMPOK BKR  
MENTIKAN II KELURAHAN MENTIKAN KECAMATAN PRAJURIT KULON KOTA  
MOJOKERTO)**

**Mochamad Dohan**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
[ahmaddohan9@gmail.com](mailto:ahmaddohan9@gmail.com)

**Tjijik Rahayu, S.Sos., M.,Si.**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
[tjijikrahaju@unesa.ac.id](mailto:tjijikrahaju@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Permasalahan remaja menjadi isu kompleks dan memerlukan kajian pemerintah untuk penyelesaiannya. Salah satu respon pemerintah dalam mengatasi permasalahan remaja yakni dengan membentuk Program Bina Keluarga Remaja (BKR) melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan berlandaskan hukum pada Peraturan Kepala BKKBN 109/PER/F2/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program BKR. Pelaksanaan Program BKR pada BKR Mentikan II diketahui masih terdapat kendala yakni keterbatasan hubungan kerja sama / MoU kelompok BKR dengan lembaga terkait, keterbatasan alat peraga dan keterbatasan kemampuan kader membuat materi penyuluhan yang menarik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program BKR (Studi pada Kelompok BKR Mentikan II Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto). Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target dan ketepatan lingkungan. Subyek penelitian ini yaitu Kepala sub bidang ketahanan keluarga sejahtera dan pengarusutamaan gender kantor BKBPP Kota Mojokerto, PKB Kelurahan Mentikan, Ketua BKR Mentikan II, dan Anggota BKR Mentikan II. Hasil penelitian secara umum masih belum berhasil. Pada Indikator ketepatan kebijakan, BKKBN kurang mengatur secara terperinci mengenai MoU lembaga terkait dengan kelompok BKR sehingga menyebabkan keterbatasan layanan penyelesaian kasus anggota BKR. Pada Indikator ketepatan pelaksanaan, menunjukkan kesesuaian pelaksanaan dengan Peraturan Kepala BKKBN 109/PER/F2/2012. Sedangkan pada indikator ketepatan target, tingkat kesiapan target sasaran masih rendah. Pencapaian target sasaran hanya mencapai 57% dari total keseluruhan target. Pada kriteria ketepatan lingkungan, variabel endogen mampu menunjang dengan baik Program BKR. Namun pada variabel eksogen diketahui Program BKR tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan dengan adanya variabel eksogen.

**Kata Kunci:** *Implementasi Kebijakan, Program BKR, Remaja*

**Abstract**

Adolescent problems become complex issues and require government studies to solve them. One of the government's responses in overcoming adolescent problems is by establishing the Youth Family Development Program (BKR) through the National Population and Family Planning Agency (BKKBN) based on the law based on the Regulation of the Head of BKKBN 109 / PER / F2 / 2012 concerning Guidelines for Management of the BKR Program. The implementation of the BKR Program at the BKR Mentikan II is known to still have constraints, namely the limited cooperation or MoU cooperation between BKR groups with related institutions, limited props and the limited ability of cadres to make interesting counseling material. This study aims to describe the Implementation of the BKR Program (Study in the BKR Mentikan II Group, Mentikan Sub District, Prajuritkulon District, Mojokerto City). This research is a qualitative descriptive study. The focus of this research is the accuracy of the policy, the accuracy of implementation, the accuracy of the target and the accuracy of the environment. The subjects of this study were the Head of Sub-Division of Prosperity in Prosperous Families and Gender Mainstreaming of the Mojokerto City BKBPP Office, PKB Kelurahan Mentikan, Chairman of BKR Mentikan II, and Members of BKR Mentikan II. Research results in general are still unsuccessful. In

terms of policy accuracy, the BKKBN does not regulate in detail the relationship between the MoU of institutions related to the BKR group, which results in limited services for resolving BKR members' cases. The indicator of the accuracy of the implementation shows the suitability of the implementation with the Regulation of the Head of BKKBN 109 / PER / F2 / 2012. Whereas in the target accuracy indicator, the level of target readiness is still low. Achievement of targets is only 57% of the total target. In terms of environmental accuracy, endogenous variables are able to support the BKR program well. However, in the exogenous variables it is known that the BKR Program is neither disadvantaged nor disadvantaged by the exogenous variable.

**Keywords:** Policy Implementation, BKR Program, Adolescent

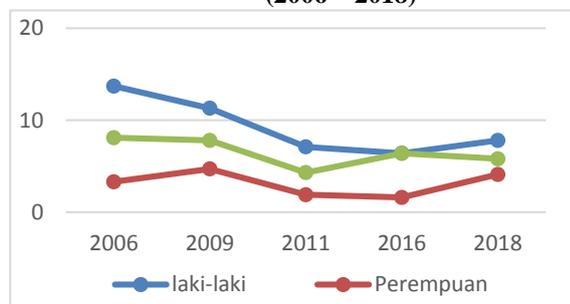
## PENDAHULUAN

Permasalahan remaja di Indonesia masih menjadi isu kompleks dan memerlukan kajian khusus dari pemerintah untuk penyelesaiannya. Beragam permasalahan remaja mulai dari penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) hingga seks bebas menjadi isu yang mengkhawatirkan terutama bagi orang tua yang memiliki anak usia remaja. Kasus permasalahan remaja yang mengarah pada kategori kenakalan bersifat melanggar hukum tergolong cukup tinggi terutama pada kasus narkoba dan seks bebas. Dihimpun data dari laman Badan Narkotika Nasional (BNN) menerangkan bahwa angka penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 (Di 13 Provinsi) mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada usia 15-35 tahun atau generasi milenial.

Jumlah kasus narkoba di Indonesia sebenarnya sempat mengalami penurunan pada tahun 2006 hingga 2011, namun mulai terjadi peningkatan di tahun 2011 hingga 2016 dan sedikit penurunan di tahun 2018 seperti pada grafik berikut ini:

### Grafik

#### Prevalensi Kasus Narkoba oleh Pelajar & Mahasiswa (2006 – 2018)



Sumber : <https://www.bnn.go.id>

Pada tahun 2006 total jumlah kasus narkoba di Indonesia memang cukup tinggi yakni mencapai 8,1%. Jumlah kasus tersebut terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2011 yang mencapai 4,1% total kasus, kemudian terjadi peningkatan lagi di tahun 2016 yakni sebanyak 6,4% total kasus dan sedikit mengalami

penurunan di tahun 2018 yakni mencapai 5,8%. Jumlah kasus narkoba memang terjadi penurunan pada tahun 2016 hingga 2018, namun sayangnya angka prevalensi pelajar dan mahasiswa yang terkena kasus narkoba masih sangat tinggi yakni mencapai 3,21 % dari total 5,8% kasus atau setara dengan 2,297,492 orang dari total 15.440.000 orang, dimana penggunaan narkoba paling tinggi dilakukan melalui suntikan yakni sebesar 0,04% atau setara dengan 286,292 orang. Adapun jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi adalah ganja, obat sakit kepala yang dikonsumsi secara berlebih dan inhalent.

Dihimpun data dari Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Pusditlatin BNN) yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan di 13 Provinsi di Indonesia, diketahui jumlah terbesar angka terpapar narkoba pada tahun 2018 ditempati oleh Provinsi Jawa Timur, adapun jumlah prevalensi angka terpapar narkoba di Provinsi Jawa Timur yakni mencapai 7.5% atau setara dengan 1.243.825 jiwa.

Sedangkan di tingkat daerah, Kota Mojokerto menjadi salah satu kota yang termasuk dalam kategori darurat narkoba. Dilansir dari suatu laman berita, menerangkan bahwa Data Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Mojokerto menyebutkan, sejak Januari – November 2019, sebanyak 523,49 gram narkoba jenis sabu dapat diamankan petugas. Sasaran peredaran narkoba tidak hanya kaum pria namun kalangan pelajar tingkat SMP dan SMA tak luput dari target.

Mengenai kasus permasalahan remaja di Indonesia, pemerintah sebenarnya telah membuat aturan dan kerangka hukum yang jelas sebagai acuan untuk mengatasi kasus permasalahan remaja yang seringkali terjadi. Dasar hukum yang dibuat sebagai upaya pembinaan remaja untuk menghindarkan remaja dari beragam permasalahan remaja telah dituangkan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Sebagai bentuk respon pemerintah terhadap permasalahan remaja yang terjadi & upaya pemenuhan amanat dari Peraturan Perundang-Undang, Pemerintah

melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membuat suatu program yang bernama Generasi Berencana (GenRe). Program Generasi Berencana (GenRe) merupakan suatu program pembinaan remaja dimana tujuan dari program tersebut untuk menghindarkan remaja dari permasalahan remaja serta berbagai perilaku menyimpang lainnya melalui pemberian pemahaman terkait bahaya penggunaan narkoba, edukasi seksual hingga pendewasaan usia perkawinan yang diharapkan melalui pemberian pemahaman tersebut mampu mengarahkan remaja pada kualitas hidup yang baik, mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana juga menikah dengan penuh perencanaan. (<http://www.genreindonesia.com>).

Program Generasi Berencana (GenRe) ini dilakukan melalui 2 jenis pendekatan yakni jenis pendekatan yang secara langsung ditujukan terhadap remaja melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) yang dilaksanakan di setiap sekolah-sekolah, serta jenis pendekatan yang ditujukan terhadap orang tua yang masih memiliki anak dengan usia remaja melalui program Bina Keluarga Remaja (BKR) yang dilaksanakan dengan pembentukan kelompok-kelompok BKR. (<http://www.genreindonesia.com>).

Peneliti justru memilih untuk memfokuskan penelitian pada jenis program yang menasar ke pendekatan keluarga yakni program Bina Keluarga Remaja (BKR) atas dasar pertimbangan adanya penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Puspitawati (2009), dimana pada hasil penelitian yang dilakukan mengungkapkan bahwa orang tua dan keluarga memiliki perananan penting dalam pengasuhan anak remajanya. Pola pengasuhan anak remaja dengan gaya pengasuhan yang cenderung hangat dapat mendukung remaja agar terhindar dari peluang melakukan tindak kenakalan baik kenakalan umum maupun yang bersifat kriminal.

Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Magdalena, dkk (2013), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa hasil uji regresi yang dilakukan menunjukkan gaya pengasuhan serta metode sosialisasi yang dilakukan oleh orang tua menjadi variabel-variabel yang mempengaruhi karakter remaja. Dari penelitian-penelitian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keluarga dan orang tua memiliki perananan yang sangat penting dalam pembentukan karakter remaja. Proses pola asuh yang meliputi pengawasan orang tua, kedekatan orang tua dan komunikasi yang dilakukan dengan tepat dipercaya dapat menghindarkan remaja dari berbagai permasalahan remaja yang ada.

Sehubungan dengan pembahasan pada bagian sebelumnya, adapun tujuan dari adanya program BKR

adalah untuk memberikan pembinaan terhadap orang tua yang masih memiliki anak remaja agar mampu memberikan pendidikan, edukasi dan arahan yang baik untuk anak remajanya. Program Bina keluarga remaja (BKR) ini lebih menasar pada para orang tua yang masih memiliki anak remaja dengan misi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan para orang tua dalam mendidik dan membina tumbuh kembang anak remaja melalui komunikasi efektif yang dilakukan antara orang tua dan anak. (Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga remaja Tahun 2017)

Salah satu landasan hukum yang mendasari dilaksanakannya program BKR dan digunakan peneliti sebagai acuan penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya dari Undang-Undang tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan terkait pelaksanaan program Bina Keluarga Remaja (BKR) melalui Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 109/PER/ F2/ 2012 tentang pedoman pengelolaan Program Bina Keluarga Remaja (BKR).

Program Bina Keluarga Remaja ini mulai dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1992 seiring dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Juncto Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Berdasarkan Data Dalam Januari 2017, jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia mencapai 42.825 kelompok dimana Kota Mojokerto merupakan salah satu kota yang juga melaksanakan Program Bina Keluarga Remaja (BKR). Pelaksanaan program BKR di Kota Mojokerto dilaksanakan di 3 kecamatan yakni Kecamatan Kranggan, Kecamatan Magersari dan Kecamatan Prajuritkulon. Hingga saat ini, berdasarkan data dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kota Mojokerto total ada sekitar 34 kelompok Bina Keluarga Remaja yang tersebar di 3 Kecamatan yang ada di Kota Mojokerto.

Peneliti justru memilih melakukan penelitian dengan studi pada Kelompok BKR Mentikan II yang ada di Kecamatan Pruritkulon karena berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kota Mojokerto, dari total jumlah 34 kelompok BKR yang ada di Kota Mojokerto, kelompok BKR Mentikan II merupakan satu-satunya kelompok yang ditunjuk sebagai kelompok percontohan atau *Central Of Excelent* (COE) dimana pemilihan kelompok percontohan tersebut atas dasar pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok BKR Mentikan II sudah banyak melakukan pengembangan-pengembangan program kerja, misalnya program “Sekolah Unik” dan “Sembako

Murah”. Adanya inovasi program tersebut membuat para anggota Kelompok BKR semakin antusias dalam mengikuti kegiatan BKR, oleh karena itu Kelompok BKR Mentikan II dipandang layak dan pantas untuk dijadikan contoh bagi kelompok-kelompok BKR yang ada di Kota Mojokerto.

Kemudian aspek kedua yakni kelompok BKR Mentikan II memiliki sistem pelaksanaan kegiatan yang lebih terstruktur dan tidak digabungkan dengan kegiatan lain, meskipun pada pelaksanaannya Kelompok BKR serigkali membuat kolaborasi program kegiatan dengan komunitas JPPRI (Jaringan Perempuan Pekerja Rumahan Indonesia) namun secara garis besar pelaksanaan kegiatan diantara keduanya tetap dilakukan secara mandiri, berbeda jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok BKR lain yang dalam pelaksanaan kegiatannya sebagian besar masih digabungkan dengan kegiatan lain seperti kegiatan jama’ah pengajian, arisan dan lain-lain.

Aspek yang ketiga adalah kelompok BKR Mentikan II juga tidak luput dari kendala-kendala implementasi. Adapun beberapa kendala yang ada pada kelompok BKR Mentikan II adalah keterbatasan penyediaan fasilitas pendukung berupa alat peraga untuk penyuluhan. Masalah lain yang masih meliputi implementasi program BKR yakni keterbatasan kemampuan para kader untuk membuat materi yang menarik dalam kegiatan penyuluhan serta adanya keterbatasan hubungan kerja sama atau MoU (Memorandum Of Understanding) dengan lembaga profesional seperti KUA, BNN, Puskesmas sehingga menyebabkan kendala bagi para kader dalam upaya penyelesaian kasus permasalahan remaja anggota kelompoknya yang membutuhkan rujukan bantuan lembaga profesional.

Hal ini tentunya menjadi bahan kajian yang menarik untuk peneliti dalam mengungkap bagaimana realitas yang terjadi di lapangan serta sebagai bahan pembandingan dengan teori-teori yang ada. Berdasarkan dari beberapa aspek yang telah diungkapkan, maka penelitian ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut Richard Matland (1995) yang menyatakan bahwa terdapat 4 indikator dalam implementasi suatu kebijakan. Pertama, ketepatan kebijakan yakni berkaitan dengan sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kedua, adalah ketepatan pelaksanaan yakni menyangkut kesesuaian teknis pelaksanaan dengan apa yang sudah dirumuskan dan tertuang dalam kebijakan yang telah memiliki legalitas hukum. Ketiga, ketepatan target yaitu bagaimana pemerintah membuat atau merancang suatu program/kebijakan yang harus disesuaikan dengan sasaran target yang dituju. Keempat, ketepatan lingkungan yakni sejauh mana program atau kebijakan yang dirancang dapat diterima oleh kondisi lingkungan

baik lingkungan kebijakan (variabel endogen) yang meliputi interaksi lembaga perumus kebijakan dengan lembaga penyelenggara dan lingkungan eksternal kebijakan (variabel eksogen) yang berkaitan dengan sikap kelompok strategis seperti media massa dan kelompok kepentingan. .

Berdasarkan penjelasan latar belakang adanya beberapa pertimbangan-pertimbangan aspek yang telah disebutkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui, mendalami dan menganalisis Program Bina Keluarga Remaja pada kelompok BKR Mentikan II di Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto dengan judul penelitian “Implementasi Program Bina Keluarga Remaja (Studi pada Kelompok BKR Mentikan II Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto)”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan terkait hasil implementasi Program Bina Keluarga Remaja (Studi pada Kelompok BKR Mentikan II Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto

## **METODE**

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian merujuk pada teori implementasi kebijakan menurut Richard Matland dalam Kadje (2015:77) yang terdiri dari 4 (empat) indikator yakni ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara terstruktur, dan studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang dikutip dalam Sugiyono (2014:246).

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.. Partisipan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling* atas dasar kesesuaian serta keterlibatan dalam fokus yang diangkat. Adapun informan-informan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bapak Junaidi selaku Kepala sub bidang ketahanan keluarga sejahtera dan pengarusutamaan gender kantor Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan (BKBPP) Kota Mojokerto. Dari informan ini akan digali informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Bina Keluarga di Kota Mojokerto.
2. Ibu Zaenab Nuraini selaku Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) wilayah Kelurahan Mentikan. Dari informan ini akan digali informasi teknis pelaksanaan kegiatan yang ada pada kelompok BKR Mentikan II
3. Ibu Pitra selaku Ketua kelompok BKR Mentikan II. Dari informan ini akan digali informasi terkait karakteristik kelompok BKR Mentikan II serta

pengalaman dalam menjalankan program BKR sebagai ketua kelompok.

4. Ibu Mulyati dan Santi selaku Anggota kelompok BKR Mentikan II kelurahan Mentikan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. Melalui informan ini akan digali informasi terkait pengalaman dan manfaat yang didapatkan selama tergabung menjadi anggota kelompok BKR.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pelaksanaannya, Implementasi Program BKR studi pada kelompok BKR Mentikan II Kota Mojokerto dirasa seseua dan memenuhi unsur-unsur implementasi kebijakan, dimana terdapat 3 aspek yang harus ada dalam implementasi kebijakan yakni unsur pelaksana yang dalam hal ini adalah BKBPP Kota Mojokerto beserta lembaga terkait. Aspek kedua yakni unsur program, dimana program yang dibuat dan dilaksanakan dalam hal ini adalah program Bina keluarga remaja (BKR). Aspek Ketiga adalah kelompok sasaran, dimana target yang dituju oleh program BKR adalah keluarga yang memiliki anak usia remaja yakni berkisar 10-24 tahun.

Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Richard Matland yang meliputi 4 indikator implementasi kebijakan yakni ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target dan ketepatan lingkungan. Berikut ini yang merupakan hasil dari penjelasan penelitian Implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) Studi pada Kelompok BKR Mentikan II Kota Mojokerto yang terdapat empat indikator implementasi yakni :

### 1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan merupakan suatu indikator dalam implementasi kebijakan yang merujuk kepada lembaga perumus kebijakan dalam usaha membuat atau merumuskan kebijakan sesuai dengan jenis permasalahan yang ingin diselesaikan sehingga ketika kebijakan diimplementasikan, dapat secara efektif mengurangi atau bahkan menanggulangi masalah yang selinkup dengan kebijakan yang telah dirumuskan. Pada indikator ketepatan kebijakan terdapat tiga kriteria yang harus dipenuhi yakni Tingkat kapasitas kebijakan atau program dalam mencakup permasalahan yang ingin diselesaikan, tingkat ketepatan perumusan program kebijakan yang disesuaikan dengan karakter persoalan dan kesesuaian kewenangan (misi kelembagaan) dengan karakter kebijakan

Program Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan suatu program yang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan keluarga khususnya kepada

orang tua yang memiliki anak usia remaja atau usia sekolah mengenai kelangsungan dalam perkembangan kehidupan anak usia remaja, sehingga remaja bisa terhindar dari risiko yang umumnya mengarah pada masalah kenakalan remaja. Melihat dari upaya pengimplementasian program BKR pada kelompok Mentikan II, maka hasil implementasi diketahui bahwa aspek pertama dari indikator ketepatan kebijakan yakni tingkat kapasitas program BKR dalam mencakup segala permasalahan pada remaja dapat ditunjang dengan baik melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok BKR Mentikan II terutama usaha dari para kader dalam melakukan pembinaan, penyuluhan hingga pengawalan penyelesaian kasus yang dimiliki oleh remaja ataupun orang tua.

Hasil kesimpulan tersebut didapat dengan mengacu pada respon yang disampaikan oleh anggota BKR yang menyatakan bahwa program tersebut membawa manfaat yang baik bagi dirinya dan anak remajanya, selain pengetahuan baru yang ia dapatkan, hubungan yang semakin baik juga tercipta antara beliau dengan anak remajanya. Banyak juga aspek permasalahan ataupun persoalan terkait dengan remaja misal kasus bullying, penyalahgunaan narkoba dan pernikahan dini yang dapat diselesaikan melalui kelompok BKR, tentunya dengan dibantu oleh para kader serta melibatkan beberapa lembaga profesional dibidangnya.

Sedangkan pada kriteria tingkat ketepatan perumusan program kebijakan yang disesuaikan dengan karakter persoalan, idealnya kebijakan harus dirumuskan dengan mempertimbangkan segala aspek baik karakter persoalan yang ingin diselesaikan maupun perumusan teknis secara keseluruhan yang akan diimplementasikan oleh lembaga pelaksana. Hal tersebut dilakukan agar dengan adanya pertimbangan secara matang dan perumusan kebijakan secara tepat diharapkan pada saat proses implementasi berjalan, kendala-kendala dalam pelaksanaan program dapat diantisipasi sehingga tidak sampai mengganggu jalannya penyelenggaraan program atau kebijakan. Melihat kondisi-kondisi pada saat proses implementasi Program BKR studi pada Kelompok BKR Mentikan II dilapangan, diketahui hasil bahwa perumusan program kebijakan yang disesuaikan dengan karakter persoalan yang ingin dipecahkan belum tercakupi dengan baik melalui perumusan kebijakan program BKR.

Terdapat beberapa hal yang dirasa kurang tepat dalam perumusan kebijakan yakni pada pokok urusan MoU antara kelompok BKR dengan lembaga terkait dinilai masih keterbatasan sehingga menyebabkan pihak dari lembaga terkait relatif memberikan layanan sesuai dengan apa yang tertera pada MoU yang sebenarnya kurang mencakup fasilitas layanan yang sebenarnya

lebih dibutuhkan oleh Kelompok BKR. Hal ini tentunya menyebabkan kendala pada saat kader BKR mengupayakan untuk penyelesaian permasalahan anggotanya yang memerlukan rujukan ke lembaga profesional seperti BNN, KUA dan Puskesmas. Sehingga kader yang membantu penyelesaian masalah diharuskan membuat MoU secara mandiri dengan lembaga profesional terkait yang biasanya dibantu dengan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di wilayah kelompoknya.

Selain itu perumusan masalah anggaran dinilai tidak sebanding dengan kompleksnya kegiatan operasional kelompok BKR. Diketahui bahwa terkait anggaran, BKKBN tidak memiliki wewenang untuk memberikan dana dan fasilitas apapun. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana anggaran dana sudah menjadi ranah Pemerintah Daerah sehingga terkait besaran dana operasional kelompok BKR yang diberikan disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Hal ini memicu kendala pada minimnya ketersediaan fasilitas pendukung seperti alat peraga dalam kegiatan operasional pada kelompok BKR di Mentikan II Kota Mojokerto.

Pada kriteria kesesuaian kewenangan (misi kelembagaan) dengan karakter kebijakan ini idealnya kebijakan harus dirumuskan dan diselenggarakan oleh lembaga yang benar-benar memiliki kewenangan serta kesesuaian misi kelembagaan dengan karakter kebijakan. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kebijakan yang tumpang tindih dengan kebijakan lainnya sehingga dapat mengurangi risiko ketidakefektifan dalam implementasi sebuah kebijakan. Untuk melihat apakah kriteria ini terpenuhi pada implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) studi pada Kelompok BKR Mentikan II Kota Mojokerto, maka diketahui bahwa Program Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan program yang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas remaja dan menghindarkan remaja dari berbagai bentuk permasalahan remaja hal tersebut sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Sedangkan yang menjadi perumus kebijakan program BKR adalah lembaga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). BKKBN merupakan lembaga yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana, hal itu sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 pasal 2 yang berkaitan dengan kedudukan, tugas dan fungsi BKKBN. lembaga yang menjadi pelaksana program BKR merupakan

organisasi tingkat daerah yaitu Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan (BKBPP) Kota Mojokerto.

BKBPP (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan) Kota Mojokerto merupakan lembaga yang memiliki tugas pokok melaksanakan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana yang telah termuat pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi BKBPP. Dari beberapa penjelasan pada bagian sebelumnya maka dapat diketahui bahwa kriteria kesesuaian kewenangan (misi kelembagaan) yang dalam hal ini BKKBN dan BKBPP selaku lembaga yang memiliki kewenangan atas perumusan serta penyelenggaraan program BKR dinilai telah sesuai dengan karakter kebijakan yang dibentuk yaitu kebijakan program BKR.

## **2. Ketepatan Pelaksanaan**

Ketepatan pelaksanaan menyangkut dengan kesesuaian teknis pelaksanaan dengan apa yang sudah dirumuskan dan tertuang dalam kebijakan yang telah memiliki legalitas hukum.. Idealnya implementasi kebijakan juga bukan selalu pemerintah saja yang menjadi aktornya, namun harus disesuaikan dengan jenis kebijakan yang akan diimplementasikan. Disini aktor-aktor lain yang dimaksud bisa mengacu pada swasta maupun masyarakat. Kriteria implementasi pada indikator ketepatan pelaksanaan dinyatakan dapat tercapai apabila dalam proses implementasi kebijakan, teknis penyelenggaraan secara garis besar telah sesuai dengan apa yang dirumuskan pada peraturan kebijakan serta pemilihan aktor pelaksana dinyatakan sesuai dengan jenis kebijakan yang akan diimplementasikan

Pada implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) studi pada Kelompok BKR Mentikan II Kota Mojokerto diketahui bahwa penyelenggaraan program BKR di Mojokerto sudah dimulai sejak tahun 1995 secara bertahap dengan teknis penyelenggaraan program BKR masih mengacu pada Peraturan Kepala BKKBN Nomor 109/PER/F2/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Bina Keluarga Remaja. Penyelenggaraan program BKR pada kelompok BKR Mentikan II diketahui baru dilaksanakan sekitar tahun 2015 dengan mekanisme penyelenggaraan yang diawali kegiatan sosialisasi di kelurahan Mentikan dengan melibatkan beberapa tokoh masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan adanya program BKR yang akan diselenggarakan di wilayahnya. Jika merujuk pada jurnal yang dikemukakan oleh Sasmito Cahyo dan Ertin Rining Nawangsri (2019:71) proses komunikasi seharusnya dibangun dengan baik dalam implementasi, hal tersebut rupanya sesuai dengan usaha yang

dilakukan oleh BKKBN yakni kegiatan sosialisasi sebagai bentuk usaha komunikasi yang dilakukan. Kegiatan sosialisasi dilakukan bersamaan dengan pendataan keluarga yang memiliki anak usia remaja yakni rentang usia 10 – 24 tahun. Pada tahap ini pendataan masih bersifat pasif dan belum dilakukan secara masif.

Tahap selanjutnya dimulai pembentukan kelompok yang diiringi dengan identifikasi permasalahan yang ada diwilayah mentikan dilanjutkan dengan penggalangan kesepakatan terkait pemilihan 1 ketua dan pengurus kader lainnya. Pada kelompok BKR Mentikan II, Bu Pitra merupakan seorang masyarakat yang menjadi relawan dan mengajukan diri untuk menjadi ketua kelompok BKR Mentikan II, hal ini bermakna bahwa pemilihan kelompok bisa dilakukan berdasarkan penunjukan dari petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) atau secara sukarela mengajukan diri menjadi ketua kelompok BKR. Sebelum kegiatan BKR benar-benar dimulai, akan dilakukan pelatihan yang ditujukan hanya kepada satu orang yakni ketua kelompok untuk mengikuti kegiatan yang pelatihan yang langsung diselenggarakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBP) Kota Mojokerto.

Kegiatan pelatihan dan training hanya dilakukan satu kali dengan diikuti oleh perwakilan-perwakilan (diwajibkan ketua kelompok) kelompok BKR yang sudah ditunjuk untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan pelatihan juga terus diadakan secara berkelanjutan selama sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Setelah perwakilan kelompok mendapatkan pelatihan, kegiatan rutin kelompok baru bisa dilaksanakan. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh kelompok BKR Mentikan II Kota Mojokerto dilakukan sebanyak 1 kali dalam satu bulan. Adapun bentuk kegiatan kelompok berupa penyuluhan, diskusi topik dan permasalahan, sharing informasi dan cerita/permasalahan dengan para anggota, serta kegiatan bermain games yang dilakukan antara orang tua remaja.

Kegiatan pada kelompok BKR Mentikan II Kota tidak hanya sebatas pada penyuluhan saja, namun juga terdapat kegiatan kunjungan ke rumah-rumah anggota kelompok yang berhalangan hadir atau sedang berada dalam masalah, untuk menanyakan dan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran pada waktu pertemuan rutin. Apabila alasan ketidakhadiran karena adanya permasalahan yang berkaitan dengan remaja, maka pihak kader akan melakukan pendampingan untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Kegiatan pendampingan merupakan kegiatan yang dikhususkan untuk seluruh anggota kelompok BKR yang memiliki permasalahan berkaitan dengan remaja, yang kemudian

akan dibantu penyelesaian masalah oleh kader dengan melakukan mediasi-mediasi serta rujukan ke lembaga profesional seperti psikolog, BNN atau puskesmas dll untuk mendapatkan penanganan secara lebih lanjut.

Pada proses pelaksanaannya diketahui yang berperan penting sebagai aktor adalah para kader yang notabennya berasal dari kalangan masyarakat yang secara sukarela berkenan untuk ikut dalam pelaksanaan program. Jika merujuk pada jurnal yang dikemukakan oleh Nisa Nida Khoirun dan Roy Valiant Salomo (2019:5) peran pemimpin sangat penting dalam penyelenggaraan suatu program atau kegiatan rupanya sesuai dengan peran keterlibatan para kader BKR yang bisa diibaratkan sebagai poros penggerak kegiatan.

Pelaksanaan program BKR pada kelompok BKR Mentikan II Kota Mojokerto, pastinya memiliki kendala atau hambatan yang seringkali dialami oleh para kader atau anggota kelompok. Adapun hambatan yang paling sering muncul adalah minimnya fasilitas berupa alat peraga dalam kegiatan penyuluhan. Setiap kegiatan penyuluhan sebenarnya harus dilakukan dengan dibantu alat peraga agar penyampaian materi bisa dilakukan secara efektif, namun karena terkendala minimnya anggaran dana operasional yang disediakan untuk kelompok BKR sehingga tak jarang Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) mencoba meminjamkan alat peraga yang dimiliki oleh PIK-R (Program Informasi Konseling Remaja) yang ada di sekolah-sekolah. Untuk mensiasati terbatasnya alat peraga, terkadang para kader juga berinisiatif membuat alat peraga secara mandiri berupa lukisan atau menggunakan barang-barang yang dianggap hampir memiliki kesamaan dengan alat peraga yang dibutuhkan.

Masalah lain yang seringkali muncul adalah keterbatasan para kader dalam membuat sebuah materi yang menarik. Pembuatan dan penyampaian materi memang menjadi tanggung jawab para kader.. Sedangkan untuk masalah diluar kegiatan penyuluhan, para kader juga mengeluhkan terkait dengan hubungan kerja sama dengan lembaga profesional dalam upaya penyelesaian kasus yang terjadi pada anggotanya. Para kader mengeluhkan pelayanan yang diberikan yang relatif menjadi kepentingan yang sedikit dikesampingkan, sehingga tak jarang upaya penyelesaian kasus berjalan lumayan lama.

Disamping keterbatasan adanya kendala-kendala yang dialami oleh kelompok BKR Mentikan II Kota Mojokerto, Kelompok BKR Mentikan II Kota Mojokerto masih terus melakukan upaya-upaya pelaksanaan kegiatan BKR secara maksimal. Salah satunya adalah dengan membuat berbagai inovasi kreatif melalui program kerja yang dibuat oleh para kadernya dengan berkolaborasi bersama Komunitas JPPRI

(Jaringan Pekerja Perempuan Rumahan Indonesia). Adapun beberapa program kerja inovasi hasil kolaborasi Kelompok BKR Mentikan II dengan Komunitas JPPRI adalah program “Sekolah Unik” dan “Sembako Murah” yang ditujukan secara khusus untuk anggota kelompok BKR.

Sekolah unik merupakan sebuah program penyediaan fasilitas belajar bersama tenaga pengajar yang dikhususkan untuk anak-anak dari para anggota khususnya pada jenjang pendidikan SD hingga SMP. Sedangkan sembako murah merupakan kegiatan penyediaan sembako dengan harga murah yang dikhususkan untuk anggota kelompok BKR. Kedua program tersebut sebenarnya juga hasil dari kolaborasi dengan komunitas Jaringan Pekerja Perempuan Rumahan Indonesia (JPPRI) yang diketuai oleh ketua yang sama pada kelompok BKR Mentikan II yakni Ibu Pitra.

### **3. Ketepatan Target**

Indikator ketepatan target berhubungan dengan kesesuaian pemilihan subjek yang akan diintervensi (atau bisa disebut sebagai target sasaran kebijakan) dengan apa yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Pemilihan target yang tepat akan memungkinkan tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. Pada indikator ketepatan target terdapat 3 kriteria untuk menentukan tolak ukur sejauh mana indikator ketepatan target dapat dicapai. Adapun 3 kriteria tersebut yakni kesesuaian target sasaran dengan apa yang sudah direncanakan, kesiapan target untuk diintervensi oleh kebijakan, dan Jenis kebijakan

Pada implementasi Program Bina Keluarga Remaja studi pada Kelompok BKR Mentikan II Kota Mojokerto, melihat dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada sumber-sumber yang telah dipilih maka pada kriteria pertama yakni kesesuaian target sasaran dengan apa yang sudah direncanakan diketahui pada kriteria pertama masih belum dapat dicapai dengan baik. Hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan oleh beberapa responden, terkait target sasaran program yang dirasa sudah tepat dengan apa yang dirumuskan oleh kebijakan, adapun target sasaran merujuk pada seluruh keluarga yang memiliki anak usia remaja yakni rentang 10-24 tahun.

Namun terkait dengan adanya intervensi yang mengarah pada target sasaran program BKR ditemukan bahwa intervensi bukan berasal dari kebijakan pemerintah, tetapi intervensi target sasaran yang sama diketahui berasal pada komunitas yang saat ini berjalan berdampingan dengan kelompok BKR Mentikan II Kota Mojokerto yakni Komunitas Jaringan Perempuan Pekerja Rumah Indonesia (JPPRI). Adanya intervensi dari komunitas tersebut tidak memicu hal-hal yang bisa

menghambat pelaksanaan program BKR, justru dengan keberadaan komunitas tersebut, program BKR pada kelompok BKR Mentikan II Kota Mojokerto mengalami banyak inovasi pengembangan dimana inovasi pengembangan diketahui hasil adanya kolaborasi antara kelompok BKR Mentikan II Kota Mojokerto dengan Komunitas JPPRI.

Pada implementasi Program BKR studi Kelompok BKR Mentikan II Kota Mojokerto diketahui bahwa kesiapan target sasaran untuk diintervensi oleh kebijakan masih rendah. Hal tersebut merujuk pada data laporan perbandingan antara target keluarga yang disasar dengan jumlah anggota keluarga yang sudah tergabung dalam kelompok kegiatan BKR terdapat selisih yang cukup jauh, dimana pada Kelurahan Mentikan target sasaran yang dicapai baru 57%.

Pada implementasi Program BKR studi pada Kelompok BKR Mentikan II diperoleh kesimpulan bahwa jenis kebijakan program BKR yang diimplementasikan pada kelompok BKR Mentikan II Kota Mojokerto merupakan jenis kebijakan lama dimana proses penyelenggaraannya juga masih didasarkan oleh kebijakan lama yakni mengacu pada Peraturan Kepala BKKBN Nomor 109/PER/F2/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Bina Keluarga. Implementasi Program BKR yang masih diselenggarakan hingga saat ini dikarenakan adanya evaluasi dan monitoring yang selalu dilakukan secara berkala hingga saat ini guna memastikan bahwa program tetap berjalan dengan baik

### **4. Ketepatan Lingkungan**

Ketepatan lingkungan merupakan indikator yang berkaitan dengan kondisi lingkungan yang menjadi ruang lingkup pada saat kebijakan diimplementasikan. Pada indikator ketepatan lingkungan, terdapat 2 jenis lingkungan yang memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan, sehingga lingkungan dianggap menjadi faktor pendukung kesuksesan dalam usaha implementasi kebijakan. Adapun 2 jenis lingkungan yakni Lingkungan kebijakan / Variabel endogen dan lingkungan eksternal kebijakan (variabel eksogen).

lingkungan kebijakan (variabel endogen) merupakan lingkungan yang mencakup ruang lingkup hubungan interaksi antara lembaga perumus dengan pelaksana kebijakan. Pada implementasi Program BKR studi Kelompok BKR Mentikan II Kota Mojokerto diketahui bahwa lingkungan kebijakan atau variabel endogen telah menunjang dengan baik program BKR, hal tersebut karena adanya interaksi yang telah dibangun dengan cukup baik antara lembaga perumus kebijakan dengan lembaga pelaksana kebijakan. Lembaga perumus kebijakan juga dirasa responsif terkait adanya masalah yang dialami oleh lembaga pelaksana.

Lingkungan eksternal kebijakan atau variabel eksogen berkaitan dengan bagaimana lembaga strategis seperti kelompok kepentingan dan media massa menginterpretasikan manfaat suatu kebijakan, sehingga hal ini nantinya akan berpengaruh pada dukungan yang diberikan oleh lembaga strategis pada saat implementasi kebijakan berlangsung. Pada lingkungan eksternal kebijakan atau variabel eksogen, diketahui bahwa implementasi Program BKR studi pada Kelompok BKR Mentikan II Kota Mojokerto tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan dari adanya keberadaan variabel eksogen. Hal tersebut diindikasikan karena kebijakan program dirasa sudah sangat lama, sehingga program BKR jarang diketahui eksistensinya oleh kelompok-kelompok kepentingan, oleh karena itu program BKR juga dapat dikatakan kurang mendapatkan atensi dari kelompok kepentingan

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Merujuk pada hasil penelitian mengenai implementasi program Bina Keluarga Remaja (BKR) studi pada Kelompok BKR Mentikan II Kota Mojokerto yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung, wawancara dan dokumentasi, maka kesimpulan implementasi program BKR dilihat dari indikator ketepatan kebijakan menunjukkan bahwa secara garis besar belum dapat dicapai secara maksimal. Beberapa diantaranya masih ditemukan persoalan yakni pada perumusan kebijakan, BKKBN kurang mengatur secara terperinci mengenai hubungan kerja sama antara lembaga terkait dengan kelompok BKR. Hal tersebut menyebabkan layanan yang seharusnya dibutuhkan oleh Kelompok BKR terutama untuk membantu penyelesaian kasus remaja menjadi terbatas dan layanan yang diberikan oleh lembaga terkait seperti KUA, BNN, dan Puskesmas hanya sebatas apa yang tertuang pada MoU yang telah disepakati. Masalah keterbatasan dana dan fasilitas juga ditemukan pada implementasi program BKR pada Kelompok BKR Mentikan II. Hal tersebut dilatarbelakangi kebijakan Pemerintah Daerah yang memberikan besaran dana dengan jumlah terbatas.

Implementasi Program BKR pada Kelompok BKR Mentikan II pada indikator ketepatan pelaksanaan menunjukkan telah adanya kesesuaian pelaksanaan dengan apa yang dirumuskan pada kebijakan. Implementasi Program BKR pada Kelompok BKR Mentikan II diketahui masih mengacu pada kebijakan lama yakni Peraturan Kepala BKKBN Nomor 109/PER/F2/ 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Remaja. Pada pelaksanaan Program BKR di Kelompok BKR Mentikan II, dari awal Kelompok BKR Mentikan II berdiri tepatnya pada tahun 2015 hingga saat

ini, BKR Mentikan II diketahui telah banyak mencapai keberhasilan dan pengembangan-pengembangan program kerja yang beberapa diantaranya adalah hasil kolaborasi dengan Komunitas JPPRI (Jaringan Pekerja Perempuan Rumahan Indonesia) seperti “Sekolah Unik” dan “Sembako Murah”. Namun disamping keberhasilan yang dicapai, pada kelompok BKR mentikan II masih terdapat banyak hambatan, diantaranya adalah keterbatasan alat peraga, keterbatasan kader dalam membuat materi yang menarik, serta pelayanan dari lembaga terkait dalam upaya penyelesaian kasus permasalahan remaja dirasa kurang maksimal.

Implementasi Program BKR pada indikator ketepatan target juga dinilai masih belum dapat dicapai dengan baik. Meskipun beberapa kriteria terpenuhi seperti halnya tidak adanya tumpang tindih target sasaran dengan intervensi kebijakan lain, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesiapan target sasaran yang dalam hal ini adalah keluarga yang memiliki anak usia remaja 10-24 tahun, untuk diintervensi oleh kebijakan program BKR masih sangat rendah. Hal tersebut merujuk pada laporan bulanan dari kader BKR yang menunjukkan hasil pencapaian target sasaran keluarga yang telah menjadi anggota kelompok BKR sekitar 57% dari total keseluruhan jumlah keluarga yang memiliki anak usia remaja di wilayah Kelurahan Mentikan.

Sedangkan implementasi Program BKR berdasarkan indikator ketepatan lingkungan diketahui bahwa variabel endogen (lingkungan kebijakan) yakni hubungan interaksi antara lembaga perumus dengan lembaga penyelenggara kebijakan berjalan dengan baik. Namun untuk variabel eksogen (lingkungan eksternal kebijakan) diketahui bahwa implementasi program BKR pada Kelompok BKR Mentikan II tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan dengan adanya keberadaan variabel eksogen. Hal ini dikarenakan faktor kebijakan program BKR merupakan jenis kebijakan lama sehingga eksistensinya jarang diketahui oleh kelompok-kelompok strategis seperti media masa dan kelompok kepentingan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran terhadap pelaksanaan program BKR pada kelompok BKR Mentikan II sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya akomodasi usulan kebijakan terhadap Pemerintah Daerah melalui BKBPP Kota Mojokerto untuk menambah anggaran dana operasional Program BKR yang dinilai sangat terbatas
2. Diperlukan perumusan kebijakan terkait hubungan kerja atau MoU yang lebih terperinci antar Kelompok BKR dengan lembaga terkait seperti KUA, BNN, Puskesmas, dan sebagainya.

3. Diperlukan peningkatan intensitas pembinaan para kader, agar kader memiliki kualitas dan ketrampilan yang mumpuni dalam usaha pengelolaan Kelompok BKR.
4. Diperlukan adanya penggalakan sosialisasi terkait Program BKR untuk meningkatkan eksistensi kebijakan Program BKR sehingga Program BKR dapat lebih dikenal oleh masyarakat sekaligus mempermudah para kader untuk mencapai target sasaran.
5. Diperlukan adanya pengembangan program yang mengarah pada strategi pelaksanaan kegiatan BKR secara digitalisasi serta fokus materi penyuluhan terkait pandemi COVID-19 sebagai upaya agar BKR tetap dapat bertahan ditengah keadaan new normal dan ancaman wabah bencana dunia.

### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih diucapkan kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya:

1. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH Unesa,
2. Tjijik Rahayu, S.Sos., M.,Si. selaku dosen pembimbing,
3. Indah Prabawati, S.Sos., M.,Si. dan Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si. selaku dosen penguji,
4. dan pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan baik secara finansial maupun dukungan moral kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

### DAFTAR PUSTAKA

BKKBN. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)*. (Online). (<http://sdki.bkkbn.go.id/?lang=id&what=news-detail&id=9&type=news>) Diakses pada 12 Januari 2020)

BNN. 2016. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.

BNN. *Penggunaan Narkotika Di kalangan Pelajar*. (Online), (<https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>) Diakses pada 12 Januari 2020)

BKKBN. 2012. *Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Nasional Materi Rakernas Program KB Nasional Tahun 2009*. Jakarta: BKKBN

BKKBN. 2012. *Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 109/PER/F2/2012 tentang Pedoman*

*Pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR)*. Jakarta: BKKBN

Cahyono Sasmito dan Ertien Rining Nawangsari. 2019. *Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu*. JPSI (Journal of Public Sector Innovation). Vol. 3, No. (2): hal.68-74. (Online), (<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/4847>) Diakses pada 18 Juni 2020)

Gunarsa. 1986. *Psikologi Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Genre Indonesia. *Apa itu Program Generasi Berencana*. (Online), (<http://www.genreindonesia.com/bina-keluarga-remaja/>) Diakses pada 21 Januari 2020)

Harymawan. 2007. *Peran Dukungan Sosial dan Kesehatan Keluarga*. Bandung: Remaja Rosda Karya

Jatim Sindo News. *Kota Mojokerto Darurat Narkoba, pelajar dan IRT Jadi Target*. (Online), (<https://jatim.sindonews.com/newsread/16874/1/kota-mojokerto-darurat-narkoba-pelajar-dan-irt-jadi-target-1575015081>) Diakses pada 14 Maret 2020)

Nisa Nida Khoirun dan Roy Valiant Salomo. 2019. *Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon*. JPSI (Journal of Public Sector Innovation). Vol. 4, No. (1): hal.1-7. (Online) (<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/4580/>) Diakses pada 18 Juni 2020)

Puslitdatin BNN. 2019. *Indonesia Drugs Report 2019*. Jakarta: Puslitdatin BNN

Puspitawati, H. 2009. *Kenakalan Pelajar Dipengaruhi oleh Sistem Sekolah dan Keluarga*. Bogor: IPB Press.

Pasaribu RM, Hastuti D, Alifiasari. 2013. *Gaya Pengasuhan Permisif dan Rendahnya Sosialisasi Nilai dalam Keluarga Berisiko Terhadap Penurunan Karakter Remaja*. Bogor: IPB Press. (Online), (<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jikk/article/view/9984>) Diakses pada 21 Januari 2020)